

BAB III

PERSEPSI POLITISI ISLAM TENTANG PEREMPUAN BERPOLITIK

A. Konteks Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Bekasi, selain sebagai salah satu kota penyangga ibu kota (DKI Jakarta) ia juga merupakan daerah strategis yang menghubungkan berbagai hal potensial daerah dan DPD PKS Kota Bekasi berlokasi di JL. KH. Noer Alie Selatan Kav.7 RT 12/11 Jaka Sampurna, Bekasi Barat – Kota Bekasi. DPD PKS Kota Bekasi berada di jalan protokol yang sangat strategis dan mudah dijangkau karena terletak di daerah Kali Malang tepat didepan Masjid Al-Azhar Kali Malang dan berada di sebrang kanan jalan. Akses jalan untuk kesana sangat mudah karena akses jalan yang dilalui dari arah barat yaitu melalui jalan Kali Malang yang menuju ke arah Bekasi Cyber Park (BCB).¹

DPD PKS Kota Bekasi memiliki visi dan misi, diantaranya yaitu Visi Umum : "sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa". Visi Khusus : "partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani".

Sedangkan misinya yaitu : Terdapat tujuh misi dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi yakni : *Pertama*, menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir; *Kedua*, mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz

¹ <http://www.pks-kotabekasi.com> (diakses pada tanggal 4 Juni 2012, pukul 09.00 WIB)

taghyir dan pusat solusi; *Ketiga*, membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat; *Keempat*, membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya; *Kelima*, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam; *Keenam*, secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi; *Ketujuh*, ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat diketahui bahwa DPD PKS Kota Bekasi mempunyai cita-cita dan tujuan, diantaranya yaitu Meletakkan perspektif dan kerangka kerja Partai dalam menyusun dan mengoperasionalkan program-program strategis, kedua: Memberikan kerangka umum kepada Partai untuk memudahkan dalam penyusunan program aksi dan langkah-langkah operasionalnya, ketiga : Menjadi patokan umum dalam memposisikan Partai sebagai kekuatan politik dalam berinteraksi dengan berbagai kekuatan masyarakat dan yang terakhir adalah menjadi guidance bagi aktivis dalam merespons dan mengantisipasi persoalan yang terjadi dalam aktivitas sosial politik.²

² www.PKS-Sumut.go.id/info-antara/, diakses pada tanggal 16 April 2012.

Jika dilihat dari misi utama dari sekian banyak misi yang dicanangkan oleh DPD PKS Kota Bekasi, adalah DPD PKS Kota Bekasi menginginkan seluruh Politisinya mempunyai rasa keimanan dan ketakwaan yang terus meningkat, karena iman dan takwa menjadi dasar dan filter dari segala hal dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.

Sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa, salah satu tema yang menjadi sorotan DPD PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Bekasi adalah kedudukan wanita dan pria di hadapan syariah. Dalam persepsi/pandangan DPD PKS Kota Bekasi, Islam tidak memperhatikan masalah kesetaraan dan keunggulan antara laki-laki dan perempuan, karena kedudukan seorang perempuan sama dengan kedudukan seorang laki-laki. Islam hanya memandang bahwa di sana terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan solusi.³

Ideologi PKS dan yang diterapkan oleh para politisi DPD PKS di Kota Bekasi tidak jauh berbeda. DPD PKS Kota Bekasi mengadopsi apa saja yang digunakan sebagai ideologi berfikir oleh PKS secara keseluruhan. Karena sebagaimana pemaparan di atas, DPD PKS Kota Bekasi merupakan salah satu partai politik keislaman yang memiliki cita-cita dan semangat untuk menegakkan syariat Islam di segala sektor kehidupan. Di samping itu, mereka juga dikenal sebagai partai politik keislaman yang telah banyak mewarnai khazanah keilmuan keislaman tidak hanya terbatas di Indonesia, tetapi juga dalam lingkup dunia.

³ Dr. H. Salim Segaf Al Jufri, M.A, *Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2005), cet. II, hal 139

B. Deskripsi Data

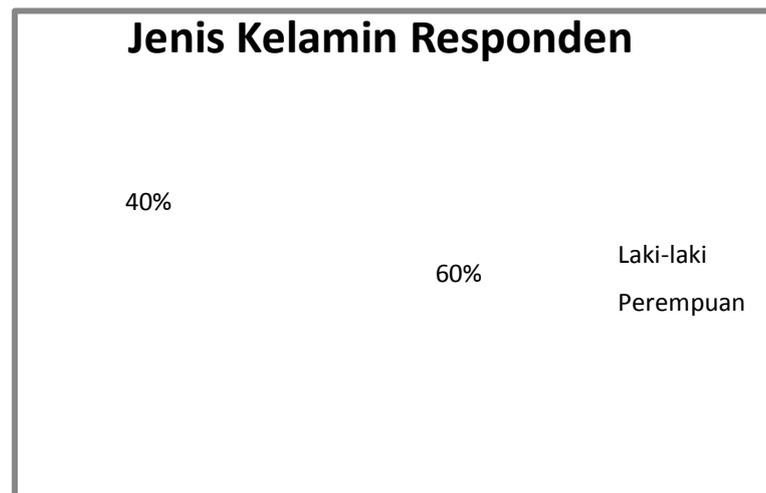
Data penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan lima responden politisi DPD PKS Kota Bekasi yang terdiri dari : *pertama* ; Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi dan beliau juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi, *kedua* ; Wakil Bendahara Bid. Pendataan dan pengelolaan Aset dan beliau juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi, *ketiga* ; Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, *keempat* ; Sekretaris Biro Bidang Perempuan dan *kelima* ; Wakil Sekretaris Bid. Hubungan Media, Komunikasi Politik dan Protokoler. Disini peneliti/penulis dalam menentukan responden menggunakan teknik purposial sampling (perwakilan) dalam memperoleh data yang diperlukan

Responden tersebut semuanya merupakan bagian dari struktur kepengurusan DPD PKS Kota Bekasi periode 2010 - 2015. Dalam pelaksanaannya, wawancara dengan para responden di lakukan di dua tempat berbeda dan juga melalui media internet, yaitu *pertama* ; di Kantor DPRD Kota Bekasi (dalam ruang Fraksi PKS) dan *kedua* ; di DPD PKS Kota Bekasi (dalam ruang seminar), selain itu juga peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan media internet melalui e-mail lantaran jadwal dari politisi DPD PKS Kota Bekasi sangat padat. Rincian dari data responden yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

Menurut data jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) politisi DPD PKS Kota Bekasi yang peneliti ambil sebagai sampel atau perwakilannya kurang lebih berjumlah 20 orang. Politisi yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang

sedangkan politisi yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 8 orang. Data responden berdasarkan jenis kelamin:

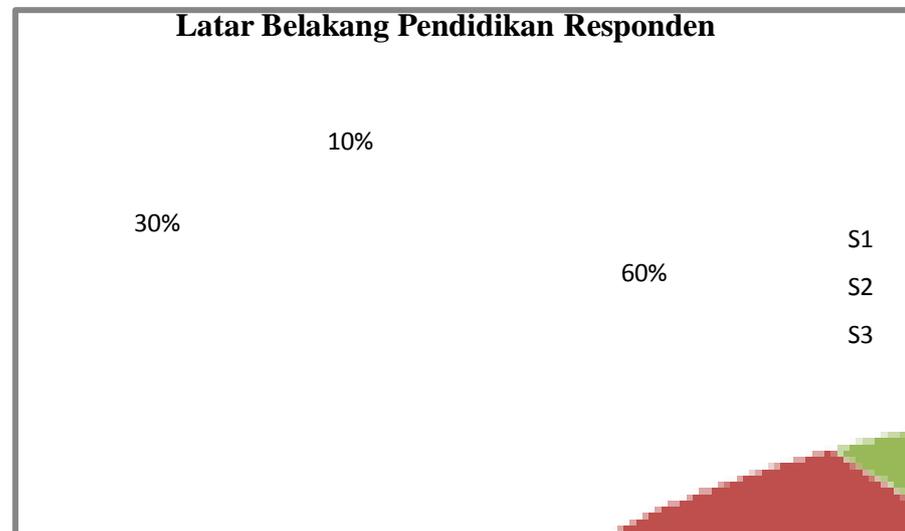
Diagram 1



Menurut ijazah pendidikan tertinggi, politisi DPD PKS Kota Bekasi yang peneliti ambil sebagai sampel atau perwakilannya kurang lebih berjumlah 20 orang dan sebagian besar sudah memiliki ijazah S1 (sarjana), yaitu sebanyak 12 orang, S2 sebanyak 6 orang, dan S3 sebanyak 2 orang. Data responden berdasarkan latar belakang pendidikan:⁴

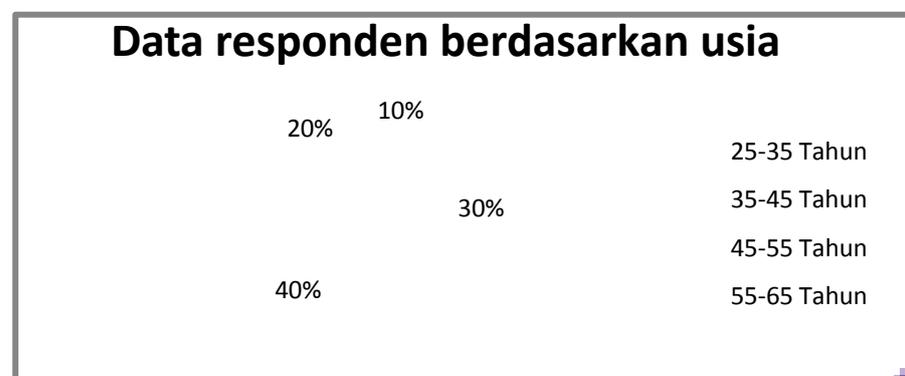
⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden

Diagram 2



Menurut data responden berdasarkan usia, politisi DPD PKS Kota Bekasi yang peneliti ambil sebagai sampel atau perwakilannya kurang lebih berjumlah 20 orang diantaranya Politisi yang berusia 25-35 tahun berjumlah 2 orang, yang berusia 35-45 tahun berjumlah 6 orang, yang berusia 45-55 tahun berjumlah 8 orang dan politisi yang berusia 55-65 tahun berjumlah 4 orang. Data responden berdasarkan usia:⁵

Diagram 3



⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden

Menurut data responden berdasarkan latar belakang organisasi keagamaan, politisi DPD PKS Kota Bekasi yang peneliti ambil sebagai sampel atau perwakilannya kurang lebih berjumlah 20 orang, diantaranya : Politisi yang memiliki latar belakang organisasi keagamaan HMI, KAMMI dan lain-lain berjumlah 12 orang, sedangkan yang tidak memiliki latar belakang organisasi keagamaan berjumlah 8 orang. Data responden berdasarkan latar belakang organisasi keagamaan:⁶

Diagram 4

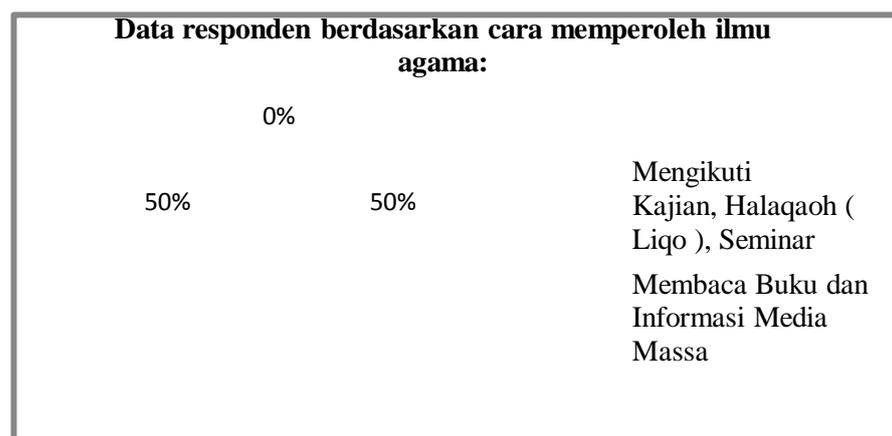


Menurut data responden berdasarkan cara memperoleh ilmu agama, politisi DPD PKS Kota Bekasi yang peneliti ambil sebagai sampel atau perwakilannya kurang lebih berjumlah 20 orang, diantaranya : Politisi yang memperoleh ilmu agama dari mengikuti kajian, halaqah (Liqo), dan seminar berjumlah 10 orang, sedangkan yang memperoleh ilmu agama dari membaca

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden

buku dan informasi media massa berjumlah 10 orang. Data responden berdasarkan cara memperoleh ilmu agama:⁷

Diagram 5



Berikut akan dipaparkan hasil penelitian penulis yang dilakukan dengan responden yang berhasil diperoleh.

C. Analisis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sekian responden yang disebarkan oleh responden. Data-data responden sebagai berikut :

1. Bentuk Hak Politik Perempuan Menurut Pandangan Politisi DPD PKS Kota Bekasi

Ada sebagian kalangan pemikir kontemporer yang menyatakan bahwa hak politik perempuan diartikan dengan salah satu bentuk kesetaraan peran/kedudukan dengan laki-laki. Dan berikut ini adalah hasil pendapat politisi mengenai bentuk hak politik perempuan yang dimaksud diatas. Benarkah hak perempuan berpolitik diartikan dengan salah satu bentuk kesetaraan peran/kedudukan dengan laki-laki.

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden

Dari hasil wawancara dengan politisi DPD PKS Kota Bekasi yang menyatakan setuju dengan pernyataan hak politik perempuan diartikan dengan salah satu bentuk kesetaraan peran/kedudukan dengan laki-laki, beliau bernama Chairoman J. Putro, M.Eng, M.Si dan beliau berpendapat bahwasannya memang benar pernyataan tersebut karena pada umumnya politik perempuan yang rendah biasanya akan muncul peran politik perempuannya dan biasanya akan muncul di masyarakat yang memiliki pandangan terkait dengan hak perempuan yang mulai terbatas dan kebalikannya emansipasi dalam konteks memandang hak politik perempuan itu secara baik/proporsional maka pasti akan mendorong peran politik perempuannya menjadi lebih besar.⁸

Sedangkan hasil wawancara dengan politisi DPD PKS Kota Bekasi yang tidak setuju dengan pernyataan hak politik perempuan diartikan dengan salah satu bentuk kesetaraan peran/kedudukan dengan laki-laki beliau bernama Hendro Subagyo, M.Eng. Beliau mengatakan bahwasannya konsep hak perempuan dalam berpolitik itu tidak bersifat “terbatas” pada perjuangan persamaan hak perempuan saja dalam hal bentuk kesetaraan peran ataupun kedudukan dengan laki-laki melainkan bisa lebih dari pada itu seperti menyuarakan hak-hak kaum perempuan, yang seringkali hanya dipahami dan dimengerti oleh kaum perempuan, seperti dalam undang-undang KDRT dan Pornografi, persamaan hak dalam pendidikan dan kesempatan kerja dan lain-lain.

Seharusnya peran perempuan dalam berpolitik itu lebih luas dan bukan hanya sekedar perjuangan persamaan hak kesetaraan peran/kedudukan perempuan

⁸ Chairoman J. Putro, M.Eng, M.Si, Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi dan Anggota DPRD Kota Bekasi, kantor DPRD Kota Bekasi (Ruang F.PKS), Wawancara Pribadi, Bekasi, 22 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.

dengan laki-laki saja karena sebagian dari bentuk politik perempuan adalah mewujudkan persamaan hak perempuan dan bukan sebaliknya.⁹

Dan hal ini lebih diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan responden yang bernama Adi Samsuito Siregar,SE beliau mengatakan bahwa konsep hak perempuan berpolitik itu sebenarnya begini bahwasannya kita jangan pernah mempersamakan atau mengidentikkan antara emansipasi perempuan saat ini (kesetaraan peran gender/kedudukan dengan laki-laki) dengan masuk dan aktifnya perempuan di berbagai kancah apapun baik itu dari sektor publik, atau umum, seperti bidang : politik, ekonomi, sosial, hukum dan seterusnya.

Kenapa saya katakan demikian, karena sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu sama dihadapan ALLAH SWT, sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai “awliya” dan mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar. Akan tetapi yang membedakannya ialah karakteristik dari keduanya baik itu dalam segi bentuk fisik ataupun non fisik maupun dalam hal fungsinya.¹⁰

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik bentuk dan fungsi yang berbeda dimana laki-laki mempunyai fisik yang kuat dan pemikiran yang rasional serta mempunyai pikiran yang panjang dalam mengambil keputusan sedangkan perempuan mempunyai fisik yang lemah, mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya dan

⁹ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email , Wawancara Pribadi , Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.

¹⁰ Adi Samsuito Siregar,SE, Wakil Sekretaris Bid. Hubungan Media, Komunikasi Politik dan Protokoler, di Kantor DPD PKS Kota Bekasi (Ruang Rapat), Wawancara Pribadi, Bekasi, 22 Juni 2012 pukul 17.00 WIB

pintar dalam urusan management/pengelolaan, dengan demikian dengan adanya perbedaan tersebut diharapkan kita sebagai laki-laki dan perempuan itu bisa saling mengisi/membantu dalam segala urusan tanpa terkecuali dalam bidang politik, sehingga akan terjadi harmonisasi kehidupan.

Jadi sudah jelas, bahwasannya antara konsep hak politik perempuan dengan emansipasi (bentuk kesetaraan peran/kedudukan dengan laki-laki) itu sangat berbeda, hal ini bisa dilihat dari maksud emansipasi perempuan itu sendiri yang cenderung menyamakan peran kaum perempuan dengan laki-laki baik itu dari sektor publik (umum)/domestik, ekonomi, dan lain-lain tanpa terkecuali dari sektor politik karena sesungguhnya peran perempuan dengan laki-laki itu tidak sama.¹¹

Kalau kita merujuk kepada konsep hak politik perempuan diatas maka akan lahir pernyataan bahwasannya perempuan masuk kedalam dunia politik diperbolehkan bahkan diwajibkan dan hal ini menyebabkan perbedaan pandangan/pendapat diantara para ulama dan masyarakat. Dan untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang pernyataan tersebut maka penulis/peneliti mewawancarai politisi yang menurut penulis sangat memahami pernyataan tersebut dan berkompeten dibidangnya.

Politisi DPD PKS Kota Bekasi yang mengatakan setuju dengan pernyataan tersebut diatas beliau bernama Chairoman J. Putro, M.Eng beliau mengatakan bahwa perempuan masuk kedalam dunia politik sebagai politisi dengan alasan bahwa harus diakui tidak semua aspek-aspek perempuan berikut

¹¹ Haryekti Rina W, S.Si, Wakil Bendahara Bid. Pendataan dan pengelolaan Aset dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Kantor DPRD Kota Bekasi (Ruang Kerja Pribadi), Wawancara Pribadi, Bekasi, 18 Juni 2012 pukul 09.10 WIB

problematikannya diketahui oleh kaum laki-laki, maka mereka harus mampu membangun kepemimpinan atau keterwakilan diantara mereka sehingga problematika kaum perempuan bisa naik dan bisa diwujudkan menjadi salah satu kebijakan negara yang nantinya akan diperuntukkan bagi kaum perempuan itu sendiri.¹²

Perempuan itu adalah separoh dari masyarakat (bahkan jumlah mereka sering kali lebih banyak dari pada kaum laki-laki). Perempuan adalah yang bertugas melahirkan dan menumbuhkan generasi, baik laki-laki maupun perempuan. Ia menjadi guru pertama generasi penerus. Allah SWT memuliakannya sebagaimana Dia memuliakan laki-laki¹³. Perempuan juga adalah makhluk berakal dan berpotensi. Al-Qur'an berbicara kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki. Al-Qur'an membebani kewajiban kepada perempuan sebagaimana laki-laki dibebani dan tanggung-jawabnya pun penuh sebagaimana dengan kaum laki-laki.¹⁴

Menurut penulis/peneliti maksud dari kebolehan itu tidak berarti wajib atau harus namun dilihat aspek kemaslahatannya bagi perempuan itu sendiri dan kemaslahatan bagi keluarga, masyarakat, dan Islam. Boleh sebuah kondisi menuntut diangkatnya sebagian perempuan tertentu pada usia tertentu dan pada kondisi-kondisi tertentu pula. Perempuan dilarang menjadi Presiden atau

¹² Chairoman J. Putro, M.Eng, M.Si, Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi dan Anggota DPRD Kota Bekasi, kantor DPRD Kota Bekasi (Ruang F.PKS), Wawancara Pribadi, Bekasi, 22 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.

¹³ QS. Al-Israa (17) ayat 70

¹⁴ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email , Wawancara Pribadi , Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.

sejenisnya (sebagai politisi) karena perempuan pada dasarnya tidak tahan menghadapi konflik, yang biasanya akan menjadi risiko pada jabatan ini.

Mengenai keterlibatan perempuan dalam berpolitik/perlemen penulis mengambil kutipan pendapat dari Dr.Yusuf Qardhawiy dalam Fatwa Kontemporer¹⁵ mengaitkan fatwanya dengan fungsi pengawasan pemerintah dan pembuatan undang-undang.¹⁵ Bila dikaitkan dengan pengawasan, ia mengambil sebuah riwayat dimana seorang perempuan dapat mematahkan gagasan Umar di dalam masjid, lalu Umar menarik pendapatnya dan menerima pendapat perempuan itu seraya berkata “Perempuan itu benar dan Umar Keliru”.¹⁶

Dan beberapa contoh lain yang semisal. Beliau mengatakan :

“Selama masih menjadi hak perempuan untuk memberi nasihat dan pandangan yang benar menurut pendapatnya serta menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar serta mengatakan “ini benar dan ini salah” dalam kapasitasnya sebagai pribadi maka tidak terdapat dalil syara’ yang melarangnya menjadi anggota parlemen untuk melaksanakan tugas-tugas ini.”

Dalam permasalahan membuat undang-undang bagi dewan (politisi perempuan), Dr Yusuf Qardhawiy justru mengatakan ijtihad dalam syariat islam itu senantiasa terbuka pintunya bagi laki-laki dan perempuan, maka dari itu perempuan pun bisa terlibat dalam hal ini.¹⁷ Beliau mengambil contoh Ummul Mu’minin Aisyah yang termasuk mujtahid dan mufti wanita dari kalangan

¹⁵ Qardhawiy , Yusuf. 2002.*Fat-wa-fatwa Kontemporer jilid dua*. Jakarta : GIP. Hal 76.

¹⁶ Qardhawiy , Yusuf. 2002.*Fatwa-fatwa Kontemporer jilid dua*. Jakarta : GIP, h.75

¹⁷ Qardhawiy, Yusuf. 2003. *Masyarakat Bebas Syariat Islam 2*. Solo : Era Intermedia, h.65

sahabat, dimana beliau sering melakukan diskusi dan sanggahan terhadap sebagian sahabat sebagaimana yang direkam dalam kitab-kitab terkenal.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwasannya masuknya perempuan dan laki-laki di parlemen maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemaslahatan umat. Akan tetapi apakah karakteristik/bentuk hak politik perempuan menurut islam sama dengan ketentuan UUD 1945. Dan berikut ini adalah hasil pendapat politisi mengenai pernyataan tersebut, benarkah bentuk hak politik perempuan menurut islam sama dengan ketentuan UUD 1945.

Menurut Adi Samsuito Siregar,SE tidak sama karena konsep politik Islam cakupannya lebih jelas dan lebih luas tidak hanya menjelaskan/menerangkan hak politik perempuan saja akan tetapi mengatur semua bentuk pemerintahan yang bisa menjadikan negara yang kita cintai ini maju dan semakin berkembang. Sedangkan saya tidak melihat UUD 1945 secara eksplisit/lebih mendetail menyebut dan menjelaskan karakteristik/bentuk hak politik perempuan secara mendalam hanya saja ada pada butir-butir pasal UUD tersebut seperti pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945.¹⁸

2. Pandangan Politisi DPD PKS Kota Bekasi dan Al-Qur'an mengenai Perempuan Berpolitik (Kepemimpinan Perempuan)

Adapun pandangan politisi DPD PKS Kota Bekasi mengenai perempuan yang beraktivitas dalam bidang politik terutama dalam hal kepemimpinan perempuan mereka mempunyai landasan yang berdasarkan dari teks-teks syara'.

¹⁸ Adi Samsuito Siregar,SE, Wakil Sekretaris Bid. Hubungan Media, Komunikasi Politik dan Protokoler, di Kantor DPD PKS Kota Bekasi (Ruang Rapat), Wawancara Pribadi, Bekasi, 22 Juni 2012 pukul 17.00 WIB

Di hadapan hukum syara', baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam hal memelihara alam beserta isinya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam urusan beragama, bertauhid, pahala, dosa, berpolitik, serta dalam hak dan kewajibannya, selain dalam hal yang bersangkutan dengan kodrat atau fitrah seorang perempuan. Hal tersebut telah tertuang di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya ”*¹⁹

Bentuk perintah yang tertuang dalam arti surat diatas merupakan salah satu bentuk landasan perempuan untuk berpolitik bersama dengan laki-laki terutama dalam hal kepemimpinan perempuan karena mereka merasa memiliki kewajiban dan peranan yang sama. Namun apakah ayat ini dapat dikatakan landasan perempuan untuk berpolitik bersama dengan laki-laki bahkan dalam hal kepemimpinan sekalipun.

Menurut Hendro Subagyo, M.Eng beliau mengatakan setuju dengan ayat tersebut, karena bahwasannya perempuan mempunyai kewajiban dan peranan yang sama dalam berpolitik bahkan dalam hal kepemimpinan perempuan dan mereka itu adalah awliya' (penolong/pelindung) bagi yang lainnya. Jadi, Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk melakukan amar makrûf nahî munkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan menggunakan media politik. Jadi, Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

¹⁹ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71

Meskipun ayat ini bukan satu-satunya yang menerangkan bahwasannya perempuan itu boleh berpolitik bersama dengan kaum laki-laki.²⁰

Hal ini lebih diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan responden yang bernama Ruqoyah beliau mengatakan bahwasannya Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berpolitik baik itu dari sisi hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan bahkan dalam hal kepemimpinan sekalipun, dan yang lebih utama dalam hal ini yaitu hak untuk berpolitik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa semua kewajiban dan peranannya tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan dan harus sesuai dengan syara' atau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ayat diatas merupakan landasan perempuan boleh melakukan aktivitas berpolitik bersama dengan laki-laki bahkan dalam hal kepemimpinan sekalipun akan tetapi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwasannya melarang perempuan berkiprah di panggung politik terutama dalam hal kepemimpinan perempuan lantaran bidang politik dan menjadi pemimpin bukan bidang yang seharusnya digeluti oleh perempuan dan juga politik itu bersifat keras, penuh intrik, kejam dan menekan yang sejatinya sangat bertolak belakang sekali dengan kodrati mereka sebagai perempuan.

Dan untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang pernyataan tersebut maka saya mewawancarai politisi yang menurut saya sangat memahami pernyataan tersebut dan berkompeten dibidangnya. Berikut ini adalah hasil

²⁰ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email , Wawancara Pribadi , Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.

²¹ Ruqoyah, Sekretaris Biro Bidang Perempuan, Menggunakan Media Internet melalui Email , Wawancara Pribadi , Bekasi, 27 Juni 2012 pukul 09.10 WIB.

pendapat politisi mengenai pernyataan tentang beberapa pendapat yang masih melarang perempuan berkiprah di panggung politik terutama dalam hal kepemimpinan perempuan.

Salah satu politisi yang menurut saya sangat memahami pernyataan tersebut dan berkompeten dibidangnya beliau bernama Hendro Subagyo, M.Eng. Beliau mengatakan tidak setuju dengan pelarangan perempuan berkiprah dalam pemilu (parlemen) bahkan dalam hal kepemimpinan, apalagi hanya sekedar melakukan aktifitas politik saja. Sebagaimana definisi politik Islam yang saya pahami dan sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya ada poin-poin penting dalam politik itu sendiri diantaranya : *pertama* ; Keadilan dan kesederajatan tanpa diskriminasi, *kedua* ; Keadilan yang merata ,dan yang *ketiga* ; Kemerdekaan yang terbimbing, maka dari poin-poin tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kelompok perempuan itu harus memiliki hak “berusaha/beraktifitas” dalam berpolitik bahkan dalam hal kepemimpinan sekalipun. Di lain pihak mereka (perempuan) juga memiliki kewajiban sebagaimana dijelaskan di poin yang selanjutnya yaitu poin *keempat* ; Mengedepankan dan mengutamakan pelayanan dari pada pendekatan kekuasaan , poin *kelima* ; Tanggung-jawab bersama dan tidak semata-mata pihak pemerintah dalam mengelola negara dan poin yang *keenam* yaitu Hukum dan undang-undang yang menjadi panglima.

Menurut penulis/peneliti kaum perempuan adalah separoh dari masyarakat (bahkan jumlahnya seringkali lebih banyak dari pada kaum laki-laki). Perempuan adalah yang bertugas melahirkan dan menumbuhkan generasi, baik laki-laki maupun perempuan. Ia menjadi guru pertama generasi penerus. Allah SWT

memuliakannya sebagaimana Dia memuliakan laki-laki.²² Perempuan juga makhluk berakal dan berpotensi. Al-Qur'an berbicara kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki. Al-Qur'an membebani kewajiban kepada perempuan sebagaimana laki-laki dibebani dan tanggung-jawabnya pun penuh sebagaimana laki-laki.

Tanggung-jawab yang bersifat umum maupun khusus sama saja dengan laki-laki. Begitu pula dalam hal tanggung-jawab terhadap harta juga utuh. Pembelajaannya terhadap hartanya juga sah tanpa perlunya persetujuan suami, ayah, saudara laki-laki. Masalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu hanya terbatas kepada masalah-masalah bersama, berhubungan dengan kerumahtanggaan, yaitu kepemimpinan dalam hal kasih-sayang, saling mengasihi, bermusyawarah, berhadapan dengan tanggung-jawab laki-laki.²³ Oleh karenanya, peneliti tertarik dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin dalam buku Prof. Taufik Yusuf Al-Wa'iy, bahwa:²⁴

- 1) Adalah hak perempuan untuk ikut serta dalam pemilu yang memilih anggota parlemen, atau semisalnya
- 2) Adalah hak perempuan untuk diangkat sebagai wakil di majelis parlemen, dengan tetap memperhatikan kehormatan dan akhlaknya
- 3) Adalah hak perempuan untuk memegang tugas-tugas sosial kecuali kepemimpinan teratas (imamah kubra) atau yang identik dengannya

²² QS. Al-Isra' ayat 70

²³ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email, Wawancara Pribadi, Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.

²⁴ Taufik Yusuf Al-Wa'iy, *Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-Muslimin*. Solo: Era Intermedia, 2002, hlm 35

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perempuan yang bekerja/beraktivitas dalam bidang publik khususnya dalam bidang politik tidak ada yang namanya pembatasan dalam beraktivitas dibidang apapun karena keduanya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama sebagaimana yang telah penulis terangkan sebelumnya.

3. Pandangan Politisi DPD PKS Kota Bekasi Mengenai Penyebab Munculnya Perempuan Berpolitik.

Kalau kita lihat konteks pada zaman sekarang ini kapasitas perempuan semakin bertambah jumlahnya di parlemen sebagai politisi akan tetapi disini akan timbul sebuah pertanyaan apakah keterlibatan perempuan dalam panggung politik hanya bersifat aksesoris politik saja atau mereka memang mempunyai motivasi dan kompetensi yang cukup memadai untuk terjun dalam dunia politik.

Dan berikut ini adalah hasil pendapat politisi mengenai pernyataan yang dimaksud. Benarkah, keterlibatan perempuan dalam panggung politik hanya bersifat aksesoris politik saja atau mereka memang mempunyai motivasi dan kompetensi yang cukup memadai untuk terjun dalam dunia politik.

Politisi yang menyatakan tidak setuju adalah Hendro Subagyo, M.Eng beliau mengatakan bahwasannya politisi yang dicalonkan PKS itu bukan bersifat aksesoris, disini saya melihat caleg dari perempuan PKS cukup berkompeten hal ini bisa dilihat di struktur organisasi PKS yang memberikan satu bidang khusus keperempuanan yang memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk menuangkan semua aspirasinya dan berkarya. Kalau motivasi tentu saja sangat tinggi, karena dasarnya adalah Al-Qur'an dan siroh sahabiyah. Terkait

kompetensi, saya kira kita telah memiliki contoh riil, misal ustadzah Yoyoh Yusroh. Kompetensinya diakui bangsa ini, bahkan manca negara.²⁵

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan responden. Menurut mereka tentu karena ada kemampuan makannya perempuan itu terjun kedalam dunia politik. Bukan hanya sekedar asesories, kalau hanya bersifat aksesoris itu sama dengan melecehkan kaum perempuan, dan Cuma jadi pajangan saja . karena Allah telah memberikan perempuan akal yang bisa dimaksimalkan potensinya.²⁶

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya perempuan itu tidak bersifat aksesoris di dunia perpolitikan karena mereka masuk ke dalam dunia tersebut justru karena mereka mempunyai kemampuan dan bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Akan tetapi apakah mereka yang masuk kedalam dunia tersebut mempunyai latar belakang yang cukup memadai untuk terjun sebagai politisi, baik yang diperoleh melalui bangku pendidikan maupun pengalaman organisasi/keperintahan. Dan berikut ini adalah hasil pendapat politisi mengenai pernyataan yang dimaksud.

Benarkah, mereka (perempuan) yang masuk kedalam dunia tersebut mempunyai latar belakang yang cukup memadai untuk terjun sebagai politisi, baik yang diperoleh melalui bangku pendidikan maupun pengalaman organisasi/keperintahan.

Hendro Subagyo, M.Eng mengatakan setuju, karena dalam banyak aksi, mereka yang caleg (calon legislatif) /anggota legislatif (aleg) saya kira memiliki

²⁵ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email , Wawancara Pribadi , Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.

²⁶ Ruqoyah, Sekretaris Biro Bidang Perempuan, Menggunakan Media Internet melalui Email , Wawancara Pribadi , Bekasi, 27 Juni 2012 pukul 09.10 WIB.

latar belakang yang cukup untuk berpolitik. Silahkan lihat mobilisasi massa perempuan dalam kegiatan sosial-politik PKS. Terkait latar belakang pendidikan, saya kurang setuju bahwa seorang politikus harus memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Politik atau FISIP atau sejenisnya. Karena menurut saya tidak setiap orang yang belajar ilmu politik bisa menjadi politikus handal, dan sebaliknya banyak sekali politikus handal tidak belajar di bangku sekolah jurusan ilmu politik. Begitu pula dengan strata, tidak setiap orang bergelar doktor bahkan profesor politik yang menjadi tokoh politik teladan dan handal, dikagumi dan dianut masyarakat yang pada akhirnya dipilih masyarakat. Dan sebaliknya, seorang tidak berpendidikan formal dapat menjadi seorang politikus handal.²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perempuan yang aktif dalam dunia politik itu bukan perempuan sembarangan dikarenakan perempuan yang masuk kedalam dunia politik memiliki motivasi yang kuat dan mereka cukup berkompeten, hal ini bisa dilihat dari struktur organisasi PKS yang memberikan satu bidang khusus keperempuanan yang memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk menuangkan semua aspirasinya dan berkarya. Selain itu juga untuk menjadi seorang politisi yang handal tidak mesti mengikuti pendidikan ilmu politik, mereka yang tidak sekolah di pendidikan ilmu politik pun juga bisa menjadi politisi yang handal asalkan mereka mempunyai niat yang kuat untuk mau terus belajar.

Selain tanggapan dan dampak, masuk dan aktifnya perempuan ke dalam dunia politik tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan perempuan

²⁷ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email, Wawancara Pribadi, Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.

tersebut masuk kedalam dunia tersebut dan pada beberapa tahun belakangan ini perempuan mengalami peningkatan jumlah baik itu dari segi kuota di parlemen maupun dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dan berikut ini adalah hasil pendapat politisi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perempuan masuk kedalam dunia politik. Benarkah demikian, bahwasannya yang menyebabkan perempuan masuk kedalam dunia politik karena ada faktor penarik dan faktor pendorongnya.

Hendro Subagyo, M.Eng mengatakan setuju bahwasannya perempuan yang masuk kedalam dunia politik memiliki faktor penarik dan faktor pendorong, berikut ini adalah faktor-faktornya :²⁸

- 1) Menyuarakan hak-hak kaum perempuan, yang seringkali hanya dipahami dan dimengerti oleh kaum perempuan, seperti dalam undang-undang KDRT dan Pornografi, persamaan hak dalam pendidikan dan kesempatan kerja dan lain-lain.
- 2) Advokasi perempuan
- 3) Usaha peningkatan moral dan pendidikan bangsa. Karena kita tahu perempuan adalah guru pertama generasi penerus.
- 4) Usaha harmonisasi kehidupan bangsa berbasis keluarga.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan responden yang bernama Haryekti Rina W, S.Si menurut beliau faktor penarik dan pendorongnya yaitu : karena perempuan sangat berat sekali meninggalkan rumah dan keluarganya, akan tetapi bagi perempuan yang mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya terutama sang suami maka ia tidak berat lagi meninggalkan rumah karena sudah

²⁸ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email , Wawancara Pribadi , Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.

mendapatkan ijin, akan tetapi tidak serta merta meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suaminya dan anak-anaknya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang aleg (anggota legislatif) harus bersidang/melakukan pekerjaannya terkadang sampai larut malam, atau studi banding ke luar kota/luar negeri. Maka dari itu perempuan yang bekerja diluar rumah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan tidak semua perempuan bisa mengemban tugas sebagai politisi hanya perempuan terpilihlah yang bisa melakukan itu semua. Dan faktor Pendorongnya ialah : kebutuhan menyuarakan (aspirasinya) dan membela kepentingan perempuan yang proporsional sesuai fitrah perempuan dalam ajaran islam.²⁹

4. Upaya Politisi DPD PKS Kota Bekasi dalam Meningkatkan Perempuan Berpolitik.

Selain faktor penarik dan faktor pendorong yang menyebabkan perempuan masuk kedalam dunia politik, pasti ada juga kendala yang dihadapi perempuan pada saat ini. Hal ini bisa dilihat dari kendala perempuan dalam meningkatkan keterwakilannya di dunia politik/parlemen. Dan berikut ini adalah hasil pendapat politisi mengenai adakah kendala yang dihadapi oleh Politisi DPD PKS Kota Bekasi sendiri dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik (parlemen).

Hendro Subagyo, M.Eng mengatakan setuju, dan menurut beliau kendala yang dihadapi DPD PKS Kota Bekasi lebih kepada kendala teknis dan administratif saja. Akan tetapi secara ideologis, DPD PKS Kota Bekasi tidak

²⁹ Haryekti Rina W, S.Si, Wakil Bendahara Bid. Pendataan dan pengelolaan Aset dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Kantor DPRD Kota Bekasi (Ruang Kerja Pribadi), Wawancara Pribadi, Bekasi, 18 Juni 2012 pukul 09.10 WIB

memiliki kendala dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan. Menurut beliau “Perempuan itu saudara kandung laki-laki” begitu hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Turmudzi, yang dikutip PKS dalam falsafah dasarnya. Artinya DPD PKS Kota Bekasi mendukung dan terus berusaha meningkatkan keterwakilan perempuan.

Realitasnya pada pemilu 2009, caleg DPR-RI perempuan PKS sebesar 200 orang atau 34.9%, melebihi kuota 30% yang diamanatkan undang-undang. Bahkan agar keterpilihannya adil, maka PKS menerapkan sistem zipper, artinya berdasarkan nomor urut PKS menempatkan 1 caleg perempuan untuk setiap tiga caleg.³⁰ Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan responden yang bernama Haryekti Rina W, S.Si menurut beliau sejujurnya perempuan lebih mencintai keluarganya, berat bagi perempuan jika harus keluar rumah jangan sampai karir politiknya merusak kebahagiaannya di dalam keluarganya. Mungkin bisa diamanahkan bagi perempuan yang memang mempunyai kapasitas untuk ke ranah publik dan kondisi anak sudah besar hingga bentuk pengasuhan dan pengawasan bisa dilakukan jarak jauh.³¹

Dalam semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan terutama dalam hal pekerjaan apapun pasti akan ada kendala yang akan dihadapi baik itu kendala secara ideologis, teknis, administratif dan lain sebagainya. Dan ternyata kendala yang dihadapi DPD PKS dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam

³⁰ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email, Wawancara Pribadi, Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.

³¹ Haryekti Rina W, S.Si, Wakil Bendahara Bid. Pendataan dan pengelolaan Aset dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Kantor DPRD Kota Bekasi (Ruang Kerja Pribadi), Wawancara Pribadi, Bekasi, 18 Juni 2012 pukul 09.10 WIB

berpolitik hanya lebih kepada kendala teknis dan administratif saja akan tetapi dari semua kendala pasti ada peranan atau upaya yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dan berikut ini adalah hasil pendapat politisi mengenai peranan atau upaya yang tepat dalam menghadapi kendala tersebut.

Chairoman J. Putro, M.Eng mengatakan setuju, menurut beliau peranan atau upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan politik tokoh perempuan tersebut juga bisa dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi tokoh perempuan dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan.³²

Selain itu juga bisa dilakukan dengan memberikan pembelajaran atau bekal terhadap perempuan yang mau berkecimpung di dunia politik, memberikan penjelasan bahwasannya islam tidak membatasi gerak-gerik perempuan dalam bidang apapun tanpa terkecuali dalam bidang politik,³³ dan meningkatkan keterwakilan atau keterlibatan perempuan dalam proses politik juga bisa dilakukan dengan cara menitipkan agenda/aspirasi kita yang berdampak untuk perbaikan hidup perempuan kepada aleg (anggota legislatif) di parlemen.³⁴

Dari penjelasan diatas tidak lengkap rasanya kalau tidak ada peranan yang dilakukan oleh politisi dalam menjelaskan keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam dunia politik, karena masih ada masyarakat yang beranggapan bahwasannya perempuan itu tidak boleh melakukan pekerjaan yang sifatnya di

³² Chairoman J. Putro, M.Eng, M.Si, Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi dan Anggota DPRD Kota Bekasi, kantor DPRD Kota Bekasi (Ruang F.PKS), Wawancara Pribadi, Bekasi, 22 Juni 2012 pukul 16.00 WIB.

³³ Haryekti Rina W, S.Si, Wakil Bendahara Bid. Pendataan dan pengelolaan Aset dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Kantor DPRD Kota Bekasi (Ruang Kerja Pribadi), Wawancara Pribadi, Bekasi, 18 Juni 2012 pukul 09.10 WIB

³⁴ Ruqoyah, Sekretaris Biro Bidang Perempuan, Menggunakan Media Internet melalui Email , Wawancara Pribadi , Bekasi, 27 Juni 2012 pukul 09.10 WIB.

luar pekerjaan rumah apalagi itu pekerjaan sebagai politisi yang jelas-jelas sangat menyita waktu karena perempuan yang bekerja sebagai politisi sangat sedikit sekali mempunyai waktu untuk keluarga dan mengurus rumah dan menurut mereka perempuan yang bekerja sebagai politisi sudah menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

Disini politisi yang terlibat mempunyai/memiliki peranan bagaimana mereka memberikan penjelasan tentang pandangan mereka terhadap eksistensi perempuan yang berpolitik kepada masyarakat awam bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan anggapan masyarakat yang sudah dijelaskan diatas. Dan berikut ini adalah hasil pendapat politisi mengenai peranan politisi PKS dalam menjelaskan pandangan mereka terhadap perempuan yang berpolitik kepada masyarakat awam. Hendro Subagyo, M.Eng mengatakan setuju, karena menurut saya peran politisi yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Bekasi cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam banyak kesempatan baik itu dengan melakukan kegiatan sosial-politik maupun pemilu, politisi DPD PKS juga “mendemonstrasikan” peranan kader perempuan kepada masyarakat awam. Bahkan memberikan contoh langsung seperti kuota 34.9% tersebut di atas.³⁵

³⁵ Hendro Subagyo, M.Eng, Wakil Sekretaris Bid. Data, Informasi, Arsip dan Sejarah, Menggunakan Media Internet melalui Email, Wawancara Pribadi, Bekasi, 21 Juni 2012 Pukul 02.43 WIB.